

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN LOGISTIK NASIONAL**

NOTA DINAS

NOMOR: PED.03.01/104/D.III.M.EKON.4/010/2026

Yth. : Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional
Hal : Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Tanggal : 7 Oktober 2026

Menindaklanjuti nota dinas Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Nomor: AK.03.01/315/SET.M.EKON.1/10/2026 tanggal 1 Oktober 2026 perihal Permintaan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III T.A 2026, dengan hormat kami sampaikan laporan kinerja Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Triwulan III Tahun 2026 untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan arahannya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional,



Khadikin, A.PI, MT.

NIP 197604152001121002

Tembusan Yth.:

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital

Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan III	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas</i>					
1.1	Indikator 1.1 Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB	Persentase	3,50%	3,50%	6,64%*	52,71%
1.2	Indikator 1.2 Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	Hari	1,3 - 1,7	1,3 - 1,7	1,64	100%
1.3	Indikator 1.3 Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor	Hari	1,3 - 1,7	1,3 - 1,7	1,19	100%
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut	Persentase	85%	65%	65%	100%
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak	Persentase	85%	65%	65%	100%

III	Sasaran Program 3 Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Logistik yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional	Indeks	3 dari 4 (Baik)	3 dari 4 (Baik)	3,29	100%
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional	Persentase	92	65	65%	100%

* Proyeksi

Kinerja Asisten Deputy Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Sistem Logistik Nasional yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB;
2. Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor;
3. Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB

Latar Belakang

Biaya transportasi angkutan darat dan laut terhadap PDB merupakan persentase dari nilai atau biaya jasa angkutan darat dan laut dibandingkan dengan PDB. Biaya jasa angkutan darat dan laut merupakan komponen dari biaya transportasi yang berkontribusi lebih dari 60%. Biaya jasa angkutan darat meliputi jasa angkutan darat selain angkutan rel, jasa angkutan rel, dan jasa angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 3,50%, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan RKP 2026. Adapun target triwulan sebesar 3,50% disesuaikan dengan baseline perhitungan Biaya transportasi angkutan darat dan laut terhadap PDB pada tahun 2025.

Realisasi Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB pada Triwulan III Tahun 2026 menggunakan realisasi Tahun Triwulan II Tahun 2026 sebesar 6,64% atau mencapai 52,71% dari target Tahun 2026 sebesar 3,50%, mengingat rilis data PDB Lapangan Usaha Harga Berlaku Triwulan III sebagai dasar perhitungan Biaya Logistik Nasional belum terbit di laman Badan Pusat Statistik dan diperkirakan akan rilis pada bulan November 2026. Untuk itu, akan ada koreksi nilai realisasi pada triwulan selanjutnya. Berikut ringkasan capaian realisasi Triwulan III:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB	Persentase	3,50% (Tahunan) 3,50% (Triwulan)	6,64% (Triwulan)	52,71% (Memuaskan)

Sampai dengan Triwulan III 2026, Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB sebesar 6,64% dari PDB atau tercapai sebesar 52,71% dari target tahunan yaitu 3,50%. Pada tahun 2026, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Penguatan Logistik Nasional melalui pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, dengan pilar strategi sebagai berikut:

- penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang Logistik;
- penguatan integrasi dan digitalisasi Layanan Logistik; dan
- peningkatan daya saing sumber daya manusia dan Penyedia Jasa Logistik

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional diarahkan untuk dapat menurunkan persentase biaya Logistik nasional terhadap produk domestik bruto sesuai target dalam dokumen perencanaan nasional serta peningkatan kinerja Logistik nasional dalam indikator kinerja Logistik global.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian c.q Keasdepan Pengembangan Logistik Nasional selaku pemrakarsa Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional terus melakukan langkah-langkah koordinatif dalam rangka memenuhi fokus yang telah ditetapkan untuk tahun 2026, melalui antara lain penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan rapat-rapat koordinasi teknis dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional

Proyeksi triwulan III tahun 2026 tidak jauh berbeda dibandingkan realisasi triwulan III tahun 2025. Realisasi triwulan III didorong oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 Penguatan Logistik Nasional yang berisikan rencana aksi 3 Strategi yang menyasar pada peningkatan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kolaborasi lintas sektor pemangku kepentingan logistik maka diprediksikan Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB menurun dan target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Biaya Transportasi Logistik Angkutan Darat dan Laut terhadap PDB			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Penetapan prioritas integrasi layanan logistik	Terlaksana	Telah dilaksanakan serangkaian rapat koordinasi integrasi layanan logistik nasional Tingkat eselon II pada tanggal 13 Agustus 2026 dengan LNSW, dan DJBC Kementerian Keuangan, Pusdatin Kemenhub, APTRINDO, APTPI, ASDEKI, ALFI, dan INSA dan 30 September 2026 dengan LNSW dan DJBC dengan pokok-pokok pembahasan sebagai berikut: 1. Rapat membahas usulan APTRINDO tentang integrasi layanan yang terkait usaha truk melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW); 2. Pelaku usaha menyampaikan permasalahan dan pendapat terkait integrasi sistem pemerintah dengan pelaku usaha Dimana belum adanya interoperabilitas dan penyatuan/integrasi data antar-sistem yang sudah ada. Selain itu, pelaku usaha juga menyampaikan adanya netralitas SINSW dan kekhawatiran mengenai persepsi bahwa pemerintah mengarahkan integrasi melalui platform Adhara milik Pelindo. 3. LNSW menjelaskan bahwa tidak seluruh data perusahaan akan dibuka, hanya data yang diperlukan untuk menjalankan <i>use case</i> tertentu yang dipertukarkan. Dari sisi keamanan sistem, terdapat

			prosedur pengujian keamanan, pelibatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta standar keamanan dan mekanisme pertukaran data dapat dibahas serta disepakati antar pihak sebelum integrasi dilakukan. 4. Saat ini Kementerian Keuangan sedang menyusun langkah-langkah implementasi Strategi 2 Renaksi Perpres. Beberapa output di dalamnya berupa regulasi, yang mana memerlukan dukungan Kemenko Ekon (SSm Ekspor, COO, Kemendag). Termasuk juga integrasi layanan logistik nasional dengan target 2026-2027. Target 2026: pengumpulan data dan informasi, penyamaan konsep probis bersama pemangku kepentingan. Untuk itu, perlu segera dibentuk Tim Nasional monitoring Perpres
2.	Penyelarasan kualifikasi umum profesi freight forwarder dan warehouse controller di tingkat ASEAN	Tidak Terlaksana	Tidak terlaksana karena terjadi pengunduran jadwal sidang Working Group LTSSWG dari semula bulan Agustus menjadi bulan November 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

- **Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional**
 - Sosialisasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti pengundangan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional tertanggal 16 Juli 2026. Sosialisasi awal yang melibatkan kementerian/lembaga dan BUMN dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Juli 2026.
 - Renaksi Penguatan Logistik Nasional terdiri atas 3 (tiga) strategi yaitu:
 1. Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan Backbone, dan Sarana Penunjang Logistik

- a. Strategi ini berfokus pada penguatan sarana dan prasarana transportasi, sarana perdagangan, rantai pasok berpendingin, aksesibilitas kewilayahan, dan logistik halal. Beberapa renaksi pada Strategi 1 diproyeksikan yang memberikan dampak langsung terhadap penurunan biaya logistik nasional di antaranya:
 - b. Pemberian insentif pembiayaan peremajaan truk diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi transportasi darat melalui pengurangan konsumsi BBM, sehingga berpotensi menurunkan biaya logistik nasional sebesar 0,06% terhadap PDB atau setara sekitar Rp12,7 triliun.
 - c. Peningkatan penggunaan angkutan multimoda diharapkan mampu menciptakan distribusi logistik yang lebih efisien dengan mengintegrasikan moda jalan dan kereta api, sehingga pada contoh rute Jakarta–Surabaya dapat memberikan penghematan biaya sekitar Rp1,9 juta per TEUs dibandingkan layanan truk.
 - d. Peningkatan penggunaan angkutan dan kapal nasional sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk ekspor CPO dan Batubara berpotensi menambah nilai ekspor jasa transportasi barang sebesar USD 2,81 Miliar, sehingga secara bertahap dapat mengurangi defisit ekspor jasa transportasi barang sebesar 39% (baseline defisit sebesar USD -7,17 Miliar tahun 2025).
 - e. Penataan konektivitas logistik berbasis laut dan rel, salah satunya melalui pembangunan dry port di Batang yang merupakan kolaborasi dari Pelindo, KAI, dan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
2. Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik
- Strategi ini berfokus pada simplifikasi dan integrasi logistik serta digitalisasi layanan logistik. Salah satu implementasi pokok dari strategi ini yaitu penguatan ekosistem logistik nasional (NLE) serta transformasi digital layanan logistik berbasis Open API yang terintegrasi dengan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang menghubungkan layanan pemerintah dengan pelaku usaha. Integrasi ini diharapkan mempercepat transformasi digital sektor logistik, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya layanan, serta memperkuat ekosistem logistik nasional yang terhubung secara end-to-end
3. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan Penyedia Jasa Logistik
- Strategi ini berfokus pada penguatan SDM bidang logistik, serta produktivitas dan daya saing penyedia jasa logistik.
- Dari total 180 keluaran/output dalam Perpres No. 41/2026, sebanyak 84 renaksi (47%) diproyeksikan berdampak langsung terhadap penurunan biaya logistik nasional, yang terdiri atas 33 renaksi pada biaya transportasi, 22 renaksi pada biaya pergudangan, dan 29 renaksi pada biaya administrasi. Sementara itu, 96 renaksi (53%) berfungsi sebagai penguatan tata kelola, regulasi, dan kelembagaan untuk mendukung transformasi logistik nasional secara berkelanjutan. Dari jumlah

tersebut, sebanyak 115 keluaran/output ditargetkan untuk dapat diselesaikan pada tahun 2026.

- Sebagaimana mandat Perpres No. 41/2026 untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi penguatan logistik nasional melalui pembentukan tim koordinasi nasional.
- **Diskusi Kajian Asian Development Bank (ADB)**
 - diskusi dilaksanakan secara daring bersama pihak Asian Development Bank (ADB) pada tanggal 8 Juli 2026 untuk membahas hasil kajian "Strategy to Enhance Export Logistics from Eastern Indonesia";
 - Poin-poin hasil diskusi sebagai berikut:
 1. Kajian mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penguatan logistik ekspor Indonesia Timur, antara lain: (i) rendahnya volume dan konsolidasi muatan, (ii) terbatasnya fasilitas pelabuhan dan rantai dingin (cold chain), (iii) tingginya kehilangan pascapanen, (iv) lemahnya infrastruktur first mile, (v) terbatasnya fasilitas pengolahan, serta (vi) proses administrasi ekspor yang lebih lambat dibandingkan wilayah barat.
 2. Lebih lanjut, sebagian besar ekspor juga masih melalui pelabuhan di Pulau Jawa sehingga menimbulkan biaya tambahan, transshipment, dan double handling. Kondisi tersebut diperberat oleh belum stabil dan berkelanjutannya volume ekspor sebagai prasyarat terbentuknya layanan pelayaran internasional langsung (direct call) yang layak secara komersial dari Indonesia Timur.
 3. Rekomendasi Kajian ADB: Pembangunan volume ekspor melalui penguatan sektor hulu, peningkatan produktivitas, konsolidasi kargo, pengembangan fasilitas logistik dan cold chain, hilirisasi komoditas, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kualitas dan sertifikasi produk dan optimalisasi Makassar sebagai hub ekspor kawasan Indonesia timur, penguatan konektivitas gateway di Pulau Jawa (Tanjung Priok dan Tanjung Perak), pemanfaatan rute pelayaran internasional yang telah tersedia, serta penerapan skema slot buying sebagai insentif sementara untuk mengurangi risiko komersial perusahaan pelayaran sampai terbentuk volume ekspor yang berkelanjutan.
 - Secara keseluruhan, kajian menegaskan bahwa penguatan logistik ekspor kawasan Indonesia Timur memerlukan reformasi yang terintegrasi di sepanjang rantai pasok, mulai dari peningkatan kapasitas produksi, pengembangan industri pengolahan, hingga penguatan konektivitas pelayaran, guna meningkatkan daya saing ekspor nasional sekaligus mendukung penguatan sistem logistik nasional.
- **Rapat Koordinasi Pembiayaan UMKM truk pada Program KIPK**
 - Rapat koordinasi dilaksanakan tanggal 29 September 2026 yang dihadiri oleh perwakilan dari Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perindustrian
 - Revisi Permenko Perekonomian 4/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan KIPK pada tanggal 22 Juni 2026 telah memutuskan untuk memuat

sektor transportasi dan penyimpanan untuk masuk dalam program KIPK. Saat ini posisi revisi Permenko Perekonomian 4/2025 telah selesai harmonisasi dan menunggu persetujuan Bapak Menko Perekonomian.

- Secara paralel, Kementerian Perindustrian sudah melakukan inventarisasi pada KBLI sektor industri yang diusulkan untuk menerima program KIPK, di mana terdapat 205 KBLI sektor industri di luar KBLI sektor transportasi. Saat ini Kementerian Perindustrian masih menunggu usulan penambahan KBLI sektor transportasi untuk dimasukkan dalam lampiran revisi Permenperin 34/2025 tentang Kriteria Penerima KIPK.
- Kemenko Perekonomian telah menginventarisir KBLI sektor transportasi yang diusulkan sebagai penerima program KIPK, yaitu KBLI 49231 dan KBLI 49232. Mengingat 2 (dua) KBLI pada sektor transportasi tersebut diampu oleh Kementerian Perhubungan dan sebagaimana pengaturan pada Pasal 4 ayat (5) revisi Permenko Perekonomian 4/2025, maka kami mengusulkan agar Kementerian Perhubungan yang menyampaikan surat usulan KBLI tersebut kepada Kementerian Perindustrian.
- Lebih lanjut, berkenaan dengan poin diatas, Kementerian Perhubungan bersedia untuk menyampaikan usulan tersebut kepada Kementerian Perindustrian. Namun, Kementerian Perhubungan memerlukan dasar berupa surat hasil rapat koordinasi untuk menindaklanjutinya.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya menyelenggarakan serangkaian rapat digitalisasi dan sosialisasi Perpres 41/2026 secara *hybrid* maupun daring secara penuh, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 50.000.000 Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi lanjutan dan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Belum semua layanan logistik berbasis digitalisasi dan juga belum terintegrasi sehingga menimbulkan beban waktu dan biaya bagi pengguna jasa;
2. Dalam penyelenggaraan angkutan barang, masih terdapat armada truk yang berusia relatif tua dan belum dilakukan peremajaan secara optimal sehingga menyebabkan peningkatan risiko gangguan kendaraan, biaya pemeliharaan, serta konsumsi bahan bakar.
3. Keterbatasan ketersediaan armada kapal nasional dan belum optimalnya pengawasan serta penegakan kebijakan penggunaan angkutan laut nasional masih menjadi kendala dalam mengurangi ketergantungan terhadap pelayaran asing.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Melakukan percepatan adopsi digitalisasi layanan logistik dan juga percepatan integrasi layanan logistik baik B to G maupun B to B
2. Percepatan program peremajaan armada secara bertahap serta optimalisasi dukungan pembiayaan melalui skema KIPK guna mendorong pelaku usaha melakukan penggantian armada yang sudah berusia tua.
3. Mendorong peningkatan penggunaan armada kapal nasional secara bertahap melalui penguatan pengawasan dan penegakan kebijakan angkutan laut nasional.

1.2. Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor

Latar Belakang

Waktu perputaran (*turnaround time*) di pelabuhan Tanjung Priok untuk kegiatan ekspor-impor adalah waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap di pelabuhan Tanjung Priok, mulai dari tiba hingga bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk yang menjadi barometer perekonomian Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok juga merupakan salah satu pintu utama proses ekspor-impor yang berkontribusi lebih dari 70% kegiatan ekspor-impor Indonesia bersama dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Waktu perputaran (*turnaround time*) di pelabuhan Tanjung Priok difokuskan untuk kegiatan ekspor-impor yang menggunakan peti kemas.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 1,3 - 1,7 hari, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan RKP 2026. Adapun target triwulan sebesar 1,3 - 1,7 hari.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor mencapai target yang telah terealisasi sebesar 1,64 hari atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 1,3 - 1,7 hari dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor	Hari	1,3 - 1,7 (Tahunan) 1,3 - 1,7 (Triwulan)	1,64 (Triwulan)	100% (Memuaskan)

Sampai dengan Triwulan III 2026, Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor mengalami kenaikan menjadi 1,64 hari dengan total kapal yang telah bersandar dengan jenis *Container Ship* sebanyak 593 kapal. Angka tersebut mencapai target sebesar 100% dari target triwulan yaitu 1,3 - 1,7 hari. Pada tahun 2026, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Peningkatan Kinerja Pelabuhan dan Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Proyeksi triwulan III tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan III tahun 2025. Realisasi triwulan III didorong oleh terbitnya Peraturan Presiden Penguatan Logistik Nasional Nomor 41 Tahun 2026 yang berisikan rencana aksi 3 Strategi yang menasar pada peningkatan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kolaborasi lintas sektor pemangku kepentingan logistik guna memantau kinerja logistik domestik maupun internasional dari sisi efisiensi maka diprediksikan target tahun 2026 terkait Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor -Impor dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Priok untuk Kegiatan Ekspor-Impor			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait strategi untuk peningkatan kinerja kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok	Terlaksana dengan perubahan	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke Pelabuhan Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Belawan pada tanggal 10 september 2026 dan 16 September 2026 dengan poin penting sebagai berikut: 1. Pelabuhan Tanjung Emas a) Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Emas masih mengacu pada RIP Tahun 2013 dan belum seluruhnya dapat diimplementasikan karena keterbatasan anggaran. b) Perlu pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mengantisipasi pertumbuhan arus barang Kawasan Industri Jawa Tengah c) Kawasan Tanjung Emas mengalami penurunan muka tanah sekitar 10 cm per tahun yang berdampak pada elevasi dermaga. d) Kondisi breakwater saat ini sudah tidak memadai sehingga Pelindo menyiapkan mooring buoy sebagai langkah mitigasi sementara.

			e) Kedalaman alur pelayaran saat ini sekitar 8,9–9,4 meter sehingga membatasi pelayanan kapal berukuran besar; f) Dwelling time di Semarang masih relatif lebih tinggi dibandingkan Jakarta dan Surabaya. g) Jalur kereta api di dalam kawasan pelabuhan telah tersedia hingga sekitar 500 meter menuju dermaga, dan sudah direncanakan raktivasi 2. Pelabuhan Tanjung Perak a) Pelabuhan Tanjung Perak melayani lebih dari 3000 kapal setiap bulan dengan jenis kapal kontainer sebanyak 200-500 kapal yang dilayani oleh 3 (tiga) terminal peti kemas. b) Telah dilaksanakan proyek pengerukan pada Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) berdasarkan hak konsesi yang diberikan Kementerian Perhubungan kepada Pelindo pada tahun 2014 c) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menerapkan digitalisasi operasional melalui aplikasi Phinisi untuk memantau kedatangan kapal dan mengoptimalkan jadwal sandar, sehingga dapat mengurangi kepadatan antrian kapal. 3. Pelabuhan Belawan a) Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Belawan mengacu pada RIP Tahun 2018 dan tengah menyusun draft 2026; b) Alur pelayaran dan kolam dermaga yang semakin dangkal akibat sedimentasi.
--	--	--	---

			Pengerukan pada alur terakhir dilakukan tahun 2021 c) Jalan menuju pelabuhan sering macet panjang dan masih ditemukan banyak pungli terhadap sopir truk pada berbagai titik di sepanjang jalan keluar Tol Belawan hingga ke pelabuhan.
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya menyelenggarakan rapat secara daring dan menghadiri undangan rapat secara daring apabila dilakukan di luar Jabodetabek sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 30.000.000 Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi lanjutan dan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu disrupsi pelayaran yang mengakibatkan perubahan jadwal operasional berdampak pada keterlambatan kedatangan kapal di Pelabuhan Tanjung Priok dan berpotensi mempengaruhi kelancaran operasional pelayanan kepelabuhanan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah Kemenko Perekonomian melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi penyampaian informasi terkait penyiapan pelabuhan dalam melakukan pelayanan bongkar muat, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia.

1.3. Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor

Latar Belakang

Waktu perputaran (*turnaround time*) di pelabuhan Tanjung Perak untuk kegiatan ekspor-impor adalah waktu yang dibutuhkan sebuah kapal untuk melakukan satu siklus lengkap di pelabuhan Tanjung Perak, mulai dari tiba hingga bersandar, bongkar muat, hingga akhirnya berlayar kembali. Waktu perputaran yang efisien sangat penting bagi efisiensi rantai pasokan dan kinerja pelabuhan secara keseluruhan. Waktu perputaran yang lama dapat menyebabkan penumpukan kapal di pelabuhan, keterlambatan pengiriman barang, dan peningkatan biaya logistik. Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi barometer perekonomian Indonesia. Pelabuhan Tanjung Perak juga merupakan salah satu pintu utama proses ekspor-impor yang berkontribusi lebih dari 70% kegiatan ekspor-impor Indonesia bersama dengan Pelabuhan Tanjung Priok. Waktu perputaran (*turnaround time*) di pelabuhan Tanjung Perak difokuskan untuk kegiatan ekspor-impor yang menggunakan peti kemas.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 1,3 - 1,7 hari, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 dan RKP 2026. Adapun target triwulan sebesar 1,3 - 1,7 hari.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 1,19 hari atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 1,3 - 1,7 hari dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor	Hari	1,3 - 1,7 (Tahunan) 1,3 - 1,7 (Triwulan)	1,19 (Triwulan)	100% (Memuaskan)

Sampai dengan Triwulan III 2026, Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor mengalami kenaikan menjadi 1,19 hari dengan total kapal yang telah bersandar dengan jenis *Container Ship* sebanyak 375 Kapal. Angka tersebut mencapai target sebesar 100% dari target tahunan yaitu 1,3 - 1,7 hari. Pada tahun 2026, fokus kebijakan pengembangan logistik nasional yaitu Kebijakan Peningkatan Kinerja Pelabuhan dan Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Perak.

Proyeksi triwulan III tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi triwulan III tahun 2025. Realisasi triwulan III didorong oleh terbitnya Peraturan Presiden Penguatan Logistik Nasional Nomor 41 Tahun 2026 yang berisikan rencana aksi 3 Strategi yang menyoroti pada peningkatan efektivitas, efisiensi, keandalan, dan kolaborasi lintas sektor pemangku kepentingan logistik guna memantau kinerja logistik domestik maupun internasional dari sisi efisiensi maka diprediksikan target tahun 2026 terkait Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Waktu Perputaran di Pelabuhan Tanjung Perak untuk Kegiatan Ekspor-Impor			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Koordinasi dan sosialisasi kepada	Terlaksana	Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke Pelabuhan

	seluruh pemangku kepentingan terkait strategi untuk peningkatan kinerja kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak		Tanjung Emas, Tanjung Perak, dan Belawan pada tanggal 10 september 2026 dan 16 September 2026 dengan poin penting sebagai berikut: 4. Pelabuhan Tanjung Emas a) Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Emas masih mengacu pada RIP Tahun 2013 dan belum seluruhnya dapat diimplementasikan karena keterbatasan anggaran. b) Perlu pengembangan kapasitas pelabuhan untuk mengantisipasi pertumbuhan arus barang Kawasan Industri Jawa Tengah c) Kawasan Tanjung Emas mengalami penurunan muka tanah sekitar 10 cm per tahun yang berdampak pada elevasi dermaga. d) Kondisi breakwater saat ini sudah tidak memadai sehingga Pelindo menyiapkan mooring buoy sebagai langkah mitigasi sementara. e) Kedalaman alur pelayaran saat ini sekitar 8,9–9,4 meter sehingga membatasi pelayanan kapal berukuran besar; f) Dwelling time di Semarang masih relatif lebih tinggi dibandingkan Jakarta dan Surabaya. g) Jalur kereta api di dalam kawasan pelabuhan telah tersedia hingga sekitar 500 meter menuju dermaga. dan sudah direncanakan raktivasi 5. Pelabuhan Tanjung Perak a) Pelabuhan Tanjung Perak melayani lebih dari 3000 kapal setiap bulan dengan jenis kapal kontainer sebanyak 200-500 kapal yang dilayani oleh 3 (tiga) terminal peti kemas. b) Telah dilaksanakan proyek pengerukan pada Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) berdasarkan hak konsesi yang diberikan
--	---	--	---

			Kementerian Perhubungan kepada Pelindo pada tahun 2014 c) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menerapkan digitalisasi operasional melalui aplikasi Phinisi untuk memantau kedatangan kapal dan mengoptimalkan jadwal sandar, sehingga dapat mengurangi kepadatan antrian kapal. 6. Pelabuhan Belawan a) Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Belawan mengacu pada RIP Tahun 2018 dan tengah menyusun draft 2026; b) Alur pelayaran dan kolam dermaga yang semakin dangkal akibat sedimentasi. Pengerukan pada alur terakhir dilakukan tahun 2021 c) Jalan menuju pelabuhan sering macet panjang dan masih ditemukan banyak pungli terhadap sopir truk pada berbagai titik di sepanjang jalan keluar Tol Belawan hingga ke pelabuhan.
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya menyelenggarakan rapat secara daring dan menghadiri undangan rapat secara daring apabila dilakukan di luar Jabodetabek sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 30.000.000 Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi lanjutan dan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu disrupsi pelayaran yang mengakibatkan perubahan jadwal operasional berdampak pada keterlambatan kedatangan kapal di Pelabuhan

Tanjung Priok dan berpotensi mempengaruhi kelancaran operasional pelayanan kepelabuhanan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah Kemenko Perekonomian melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi penyampaian informasi terkait penyiapan pelabuhan dalam melakukan pelayanan bongkar muat, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia.

2

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut;
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor -Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak;

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan berkualitas apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 85% penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Tahun 2026. Adapun target triwulan III sebesar 65%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 65% atau mencapai 76,47% dari target Tahun 2026 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas	Persentase	85% (Tahunan)	65% (Triwulan)	100% (Memuaskan)

Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut		65% (Triwulan)		
--	--	-------------------	--	--

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut pada Triwulan III Tahun 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi dalam rangka identifikasi kebijakan untuk Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut.

Proyek Triwulan III Tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi Triwulan III Tahun 2025 didorong oleh intensnya koordinasi antar stakeholder dengan berbagai langkah koordinatif yang telah dilakukan, maka diprediksikan target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penguatan Infrastruktur Konektivitas pada Angkutan Darat dan Laut			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan peningkatan konektivitas prasarana angkutan darat dan laut yang mendukung efisiensi biaya dan	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi tindak lanjut Nota Kesepahaman Rencana Kerja Sama Pembangunan, Pengembangan, dan Pengusahaan Logistik Berbasis Rel di Dryport KEK Industropolis Batang (ditandatangani 21 April 2026) pada tanggal 12 Agustus 2026 secara luring di Gedung KAI Jakarta Railway Centre, dengan poin penting sebagai berikut: 1. Disepakati percepatan kajian dengan PT KITB sebagai lead: penyusunan KAK ± 1 (satu) bulan, pengadaan konsultan pada September 2026, kajian selesai paling lambat Januari 2027, dilanjutkan peningkatan Nota Kesepahaman menjadi Perjanjian

	kelancaran logistik		Kerja Sama, dan pembangunan dryport dimulai pada triwulan III 2027. 2. Terdapat 3 (tiga) isu yang memerlukan dukungan kebijakan: a. Tarif angkutan kereta api belum kompetitif terhadap trucking karena kebutuhan belanja modal yang jauh lebih besar dan belum adanya insentif. b. Dengan beroperasinya dryport KITB Batang diperkirakan potensi kenaikan volume peti kemas dari Batang hingga 10 (sepuluh) kali lipat sehingga memerlukan tambahan ± 20 perjalanan dan ± 30 rangkaian. c. Dryport memerlukan kodefikasi pelabuhan/ United Nations Code for Trade and Transport Locations (UN/LOCODE) karena pengelolaan dokumen kepabeanan saat ini masih merujuk pada pelabuhan utama. 3. Dari sisi kesiapan, PT Pelindo menyampaikan peningkatan kapasitas TPKS Tanjung Emas dari 1,5 s.d. 1,6 juta TEUs menjadi 2,5 juta TEUs pada akhir 2027 serta penambahan 1,5 juta TEUs di Kalibaru pada pertengahan 2028. 4. Sebagai tindak lanjut, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional akan mengawal setiap tahapan pembangunan dryport KITB Batang dan tahap awal penyelesaian kajian yang dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama sehingga target pembangunan pada triwulan III 2027 dapat tercapai.
--	---------------------	--	--

Infrastruktur konektivitas logistik terkait erat dengan konektivitas hubungan antar negara yang diinisiasi melalui perjanjian internasional. Perjanjian internasional seringkali mencakup kesepakatan untuk meningkatkan infrastruktur transportasi dan logistik antar negara, yang pada akhirnya memperlancar arus barang, jasa, dan orang. Terkait dengan hal ini, kami terlibat dalam beberapa negosiasi perjanjian internasional terutama yang memiliki keterkaitan dengan isu logistik dan *supply chain*.

- **ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Negotiation**

Dalam forum ini kami bertindak sebagai *focal point* Pemri untuk pembahasan isu terkait *supply chain* yang ada didalam chapter *Supply Chain Connectivity* pada ACFTA Upgrade 3.0. Salah satu bentuk

rekomendasi kebijakan yang kami hasilkan dalam forum ini adalah pada surat masukan posisi Indonesia yang disampaikan secara langsung dalam email korespondensi pembahasan antara *ASEAN Member State (AMS)* maupun dalam rangka rapat persiapan pelaksanaan *SJC ACFTA 3.0 Upgrade Negotiation* yang diampu oleh pihak Kementerian Perdagangan. Lebih lanjut, dalam TW III 2026 kami telah menghadiri beberapa pertemuan, antara lain:

- Pada tanggal 20 Juli 2026 telah dihadiri secara virtual Rapat Persiapan the 17th ASEAN-China FTA JC dan 14th ASEAN-China FTA CROO.
- Pada tanggal 23-24 Juli 2026 telah dihadiri secara virtual pertemuan 17th ASEAN-China FTA JC.
- Pada tanggal 15 September 2026 telah dihadiri secara virtual rapat pembentukan perjanjian dagang Indonesia-RRT.

- **ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)**

Dalam forum ini, kami bertindak sebagai anggota dari Working Group Supply Chain Connectivity dan Energy, Raw and Intermediate Materials sebagai focal point untuk isu *Supply Chain Connectivity*. Telah dilaksanakan rangkaian pertemuan caucus serta plenary dari 1st AKFTA WG SCC&ERIM pada TW II 2026, yang telah menghasilkan beberapa kesepakatan terkait dari isi draft perjanjian di dalam Chapter SCC dan ERIM pada AKFTA. Terkait hal tersebut dalam TW III 2026 kami telah menghadiri beberapa pertemuan terkait, antara lain:

- Pada tanggal 22 Juli 2026 telah dihadiri secara virtual diskusi pembahasan posisi Indonesia dan persiapan negosiasi upgrade AKFTA-WGSDGE.
- Pada tanggal 26 Agustus 2026 telah dihadiri secara virtual intersessional ASEAN caucus AKFTA-WGTIG meeting.
- Pada tanggal 24 September 2026 telah dihadiri secara virtual rapat persiapan pertemuan the 3rd AKFTA upgraded JC and related meetings.
- Pada tanggal 28-30 September 2026 telah dihadiri secara virtual rangkaian pertemuan caucus serta plenary dari 2nd Meeting of AKFTA WG SCC&ERIM.

- **ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC)**

Dalam forum ini, kami bertindak sebagai koordinator nasional terkait program kerja Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 yang telah selesai di tahun 2025. Saat ini dilanjutkan dengan program ASEAN Connectivity Strategic Plan (ACSP) yang diampu oleh Kementerian Luar Negeri. Salah satu bentuk rekomendasi kebijakan yang kami hasilkan dalam forum ini adalah pada penyampaian dukungan bahan dan masukan point-point isu terkait bidang logistik maupun dari materi terkait dengan program kerja MPAC 2025 sebelumnya kepada pihak Kementerian Luar Negeri untuk dipergunakan dalam proses perundingan maupun program kerja ACSP. Terkait hal tersebut dalam TW III 2026 kami telah menghadiri beberapa pertemuan terkait, antara lain:

- Pada tanggal 21 Agustus 2026 telah dihadiri secara virtual rapat penyusunan posisi dan permintaan masukan untuk the 2nd meeting of ACCC and High Level Conference on ASEAN Connectivity.
- **Rencana Kerja Sama Logistik Kerajaan Arab Saudi - Indonesia**
 Dalam forum ini, kami bertindak sebagai pengampu isu logistik dari pihak Pemri untuk pembahasan rencana kerja sama terkait logistik yang di inisiasi oleh pihak Arab Saudi. Salah satu bentuk rekomendasi kebijakan yang kami hasilkan dalam forum ini adalah pada penyampaian dukungan bahan wicara dan point-point isu kerja sama kedua negara di bidang logistik yang akan disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Kementerian Transportasi dan Layanan Logistik Kerajaan Arab Saudi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai counter partnya, maupun pertemuan dengan Bapak Menko Perekonomian. Lebih lanjut, dalam TW III 2026 kami telah menghadiri beberapa pertemuan, antara lain:
 - Pada tanggal 7 Juli 2026 telah dihadiri secara offline rapat koordinasi lanjutan untuk persiapan bahan dan butir wicara Menteri Perhubungan terkait kunjungan Minister of Transport and Logistic Services for the Kingdom of Saudi Arabia.
 - Pada tanggal 10 Juli 2026 telah dihadiri secara online rapat koordinasi untuk posisi akhir persiapan kunjungan Minister of Transport and Logistic Services for the Kingdom of Saudi Arabia.
 - Pada tanggal 14 Juli 2026 telah diselenggarakan pertemuan antara Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dengan Minister of Transport and Logistic Services for the Kingdom of Saudi Arabia.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang difasilitasi oleh PT.KAI, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 50.000.000 Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi lanjutan dan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu ketidakcukupan anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Perpres 41/2026

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu dengan mengusulkan anggaran tambahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Perpres 41/2026 tentang Penguatan Logistik Nasional

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor -Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Latar Belakang

Persentase keberhasilan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor-Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan berkualitas apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 85%, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Tahun 2026. Adapun target triwulan III sebesar 65%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor - Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 65% atau mencapai 76,47%% dari target Tahun 2026 sebesar 85% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor -Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak	Persentase	85% (Tahunan) 65% (Triwulan)	65% (Triwulan)	100% (Memuaskan)

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor -Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak pada Triwulan III Tahun 2026 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada rencana aksi. Dimana telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi dalam rangka penyusunan dan/atau penetapan

alternatif rekomendasi kebijakan peningkatan layanan dan sarana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak yang juga telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional serta Pembangunan Dashboard Kinerja Logistik Nasional.

Proyeksi Triwulan III Tahun 2026 tidak berbeda dibandingkan realisasi Triwulan III Tahun 2025 didorong oleh intensnya koordinasi antar stakeholder dengan berbagai langkah koordinatif yang telah dilakukan, maka diprediksikan target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kinerja Bongkar Muat Peti Kemas untuk Kegiatan Ekspor -Impor di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak			
No	Rencana Aksi TW III	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi penyusunan dan/atau penetapan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan layanan dan sarana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Asosiasi dan Pelaku Usaha Pelayaran domestik dan internasional pada hari Senin, 31 Agustus 2026 secara <i>hybrid</i> untuk membahas isu dan permasalahan terkait konektivitas pelayaran dan layanan di pelabuhan, dengan poin penting sebagai berikut: 1. Upaya penurunan Biaya logistik perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap dari faktor yang mempengaruhi harga input jasa transportasi dan faktor operasional. 2. Faktor yang mempengaruhi inefisiensi pelabuhan sehingga meningkatkan biaya kepelabuhanan antara lain: a. Keterbatasan fasilitas bongkar muat yang mempengaruhi keterlambatan window dan kepadatan pelabuhan menyebabkan waktu tinggal kapal/port stay di pelabuhan semakin panjang dan menimbulkan efek domino terhadap jadwal pelayaran biaya operasional kapal yang lebih besar.

			b. Beberapa pelabuhan besar seperti Semarang, Belawan dan yang lain masih mengalami pendangkalan alur pelayaran dan keterbatasan kedalaman sehingga memperlambat pergerakan kapal untuk dapat sandar. c. Kapasitas pelabuhan yang terbatas mempengaruhi kemampuan pelayanan kapal besar. 3. Kebijakan tarif mempengaruhi program peremajaan ribuan kontainer baik domestik dan internasional setiap tahunnya. 4. Keterbatasan kontainer internasional di wilayah timur Indonesia sebagai dampak dari ketimpangan kargo ditambah penerapan asas cabotage untuk kontainer internasional kosong yang menyebabkan tambahan biaya angkut kontainer tersebut ketika dibawa ke wilayah timur.
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya menyelenggarakan rapat koordinasi terkait konektivitas pelayaran dan layanan di pelabuhan secara *hybrid*, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 20.000.000 Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat koordinasi lanjutan dan monitoring dan evaluasi kebijakan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu ketidakcukupan anggaran untuk melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Perpres 41/2026

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan III tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu dengan mengusulkan anggaran tambahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi Perpres 41/2026 tentang Penguatan Logistik Nasional

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Terpenuhinya seluruh layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kepada stakeholder demi terciptanya kebijakan yang berkualitas;

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar Baik (3 dari 4), penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Tahun 2026. Adapun target triwulan sebesar 3 dari 4 (Baik).

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 3 dari 4 atau mencapai 100% dari target Tahun 2026 sebesar 3 dari 4 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional	Indeks	3 dari 4 (Tahunan) 3 dari 4 (Triwulan)	3,29	100% (Memuaskan)

Asdep Pengembangan Logistik Nasional telah menyusun daftar pertanyaan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang akan disebar kepada Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait pada Triwulan III 2026. Pertanyaan survei dibagi menjadi 4 bagian dengan rincian yaitu: (i) Informasi umum; (ii) Identitas Layanan; (iii) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan; dan (iv) Aspek Kepuasan Substansi Layanan serta kritik dan saran. Untuk jawaban bagian iii dan iv menggunakan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas. Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di

Bidang Pengembangan Logistik Nasional digunakan untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Asdep Pengembangan Logistik Nasional dan dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja kedepannya..

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik nasional merupakan *cascading direct* dari Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital yang pada Tahun 2026 ditargetkan 3 dari 4 (Baik).

Berdasarkan survei yang telah dilaksanakan, didapatkan hasil survei dari 38 responden dengan hasil akhir/indeks sebesar 3,2 atau Baik (3 dari 4)

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Dimana telah dilakukan penyusunan daftar pertanyaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada periode sebelumnya, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional diproyeksikan dapat dilaksanakan dan memperoleh nilai yang diharapkan pada Triwulan IV 2026, sehingga diprediksikan target tahun 2026 dapat terpenuhi.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Tindak lanjut Pelaksanaan dan Pelaporan Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional Semester I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional yang menghasilkan data dari 38 Responden dengan indeks kepuasan layanan KSP sebesar 3,2.
2.	Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan daftar pertanyaan untuk pelaksanaan survei di Semester II

	Pengendalian di Bidang Pengembangan Logistik Nasional Semester II		
--	---	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya berupa waktu penyusunan pertanyaan survei yang mengacu pada pertanyaan di tahun-tahun sebelumnya, sehingga proyeksi efisiensi waktu adalah sebesar 1 hari. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk melaksanakan tugas lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, tidak terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional;

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase

Pelaksanaan Rencana

Aksi Reformasi

Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Asisten Deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Asisten Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Jumlah minimum IKU RB yang wajib didukung adalah Tingkat Capaian Kebijakan Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai, Tingkat Maturitas SPIP, Nilai SAKIP, Indeks Perencanaan Pembangunan, Capaian Prioritas Nasional (K/L), dan Tingkat Digitalisasi Arsip.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 92%, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Tahun 2026. Adapun target triwulan III 2026 adalah 65%.

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 65% atau mencapai 70,65% dari target Tahun 2026 sebesar 92% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional	Persentase	92% (Tahunan) 65% (Triwulan)	65% (Triwulan)	100%

Berdasarkan identifikasi capaian kinerja yang telah dilakukan, dalam proses pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional pada Triwulan III 2026 sudah sesuai dengan target yang telah

ditetapkan pada rencana aksi perjanjian kinerja. Dimana telah dilakukan pelaporan kinerja, monitoring capaian kerja secara berkala, dan implementasi Srikandi.

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2026 telah terealisasi sesuai dengan Kertas Kerja Rencana Aksi RB General yang telah ditetapkan. Dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam penyusunan beberapa kegiatan. Sampai dengan akhir Triwulan III Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Diperkirakan dengan melihat jangka waktu dan hasil yang telah dicapai pada Triwulan III, Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional diproyeksikan dapat tercapai di akhir Triwulan IV 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Terlaksana	Telah dilakukan Penyusunan Matriks Manajemen Risiko
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III
3.	Penyusunan TOR Dan RAB Atas Revisi Renja 2026	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan TOR dan RAB atas revisi Renja 2026
4.	Monitoring Capaian Kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional Triwulan III	Terlaksana	Telah dilakukan Monitoring Capaian Kinerja Rincian Output Prioritas Nasional Triwulan III Keasdepan Pengembangan Logistik Nasional
4.	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi Triwulan III	Terlaksana	Telah dilakukan Optimalisasi Pemanfaatan

			SRIKANDI Triwulan III pada surat dinas Keasdepan Pengembangan Logistik Nasional
--	--	--	---

Secara umum pencapaian kinerja Triwulan III Tahun 2026 dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana telah dilakukan serangkaian kegiatan dalam penyusunan beberapa dokumen dengan hasil sebagai berikut:

- Telah disampaikan dokumen Matriks Manajemen Risiko
- Telah disampaikan dokumen Laporan Kinerja Triwulan III Keasdepan Pengembangan Logistik Nasional;
- Telah disampaikan dokumen TOR Dan RAB Atas Revisi Renja 2026 Keasdepan Pengembangan Logistik Nasional pada bulan Juli 2026;
- Telah disampaikan dokumen hasil Monitoring Capaian Kinerja Rincian Output Prioritas Nasional Triwulan III Keasdepan Pengembangan Logistik Nasional;
- Telah dilakukan pemanfaatan Srikandi dalam Surat Dinas Keasdepan Pengembangan Logistik Nasional.

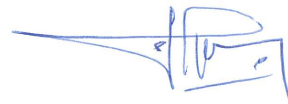
Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya mengurangi penggunaan kertas dalam penyusunan laporan atau bahan paparan, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 500.000,-. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan penyusunan laporan atau bahan paparan yang akan datang

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, tidak terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, Oktober 2026

 Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik



Khadikin